

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Seiring dengan pertumbuhan demografi, Indonesia semakin mengalami tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah pada tahun 2024 di 321 Kabupaten/Kota di Indonesia mencapai 35,3 juta ton per tahun. Dari jumlah timbulan sampah tersebut, hanya 38,78% atau sekitar 13,5 juta ton sampah yang terkelola melalui fasilitas pengelolaan sampah, sedangkan 61,22% atau sekitar 21,4 juta ton sampah tidak terkelola (SIPSN, 2024). Sampah yang tidak terkelola tersebut akan berakhir di tempat pembuangan akhir sampah atau yang dikenal dengan TPA.

Pada tingkat Provinsi, jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data, jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa Barat mencapai 8,03 juta ton per tahun (SIPSN, 2023). Sedangkan di tahun 2024, jumlahnya turun menjadi 6,15 juta ton per tahun (SIPSN, 2024). Dengan adanya penurunan sekitar 23,45% ini dapat mengindikasikan bahwa adanya perbaikan sistem dalam pengelolaan sampah di tingkat Provinsi baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan program pengurangan sampah, ataupun melalui efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Penurunan ini juga dapat membuktikan bahwa adanya perubahan pola konsumsi dan produksi sampah pada masyarakat serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengolah, memilah, dan mendaur ulang sampah di tingkat Provinsi.

Sementara itu, di daerah perkotaan khususnya Kota Tasikmalaya, jumlah timbulan sampah menunjukkan hasil yang berbeda dengan Provinsi. Jumlah timbulan sampah di Kota Tasikmalaya ialah 117,9 ribu ton per tahun (SIPSN, 2023). Sedangkan di tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Kota Tasikmalaya

meningkat menjadi 121,7 ribu ton per tahun (SIPSN, 2024). Dengan adanya peningkatan jumlah timbulan sampah yakni sekitar 3,18% mengindikasikan bahwa adanya tantangan dalam pengelolaan sampah di tingkat Kota.

Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap harinya manusia menghasilkan sampah. Sampah bisa didefinisikan sebagai sisa limbah dari aktivitas yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tidak memiliki manfaat. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa sampah merupakan limbah yang dihasilkan oleh manusia hampir setiap hari dan sampah yang dihasilkan tersebut tentunya memerlukan pengelolaan agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, adanya penerapan konsep memilah, memanfaatkan, dan mendaur ulang kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang dilakukan di tingkat masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengumpulan lalu pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) saja, melainkan dengan prinsip mengurangi sampah sejak dari sumbernya, memanfaatkan kembali sampah yang masih layak digunakan, serta mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sampah ialah melalui program Tempat Pengolahan Sampah (TPS) yang berbasis 3R atau dikenal dengan TPS 3R. Saat ini kegiatan 3R dapat mengurangi timbulan sampah sekitar 15-20% dari total timbulan sampah di kota (Adisanjaya & Lestari, 2018, p. 105). TPS ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di perkotaan yang saat ini masih krusial dengan permasalahan sampah. Namun meskipun telah ada upaya melalui TPS, dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai produsen utama sampah sehari-hari. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah

yang dilakukan melalui TPS diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal. Namun jika tidak, pengelolaan sampah yang kurang akan merugikan manusia dan juga lingkungan (Lisha et al., 2025, p. 185).

Tempat Pengolahan Sampah (TPS) berbasis 3R memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan. Keberadaan TPS ini dirancang untuk dapat mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri dalam memilah sampah sejak dari sumbernya (Aprilia et al., 2024, p. 59). Hal tersebut menunjukkan bahwa TPS tidak hanya berperan secara teknis saja, namun juga berperan secara edukatif dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. TPS juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip 3R karena melalui TPS ini memungkinkan agar sampah yang terkumpul bisa dipilah dan dimanfaatkan kembali sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah dan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat (Putranto, 2023, p. 8593).

Secara umum, masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan sampah karena masyarakat merupakan produsen utama sampah rumah tangga ataupun sejenis rumah tangga. Upaya pengelolaan sampah berbasis 3R sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, yang awalnya masyarakat hanya sekedar membuang sampah berubah menjadi mengelola sampah tersebut (August et al., 2023, p. 9). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat, prinsip 3R yang diamanatkan dalam regulasi tidak akan bisa berjalan dengan optimal karena masyarakat menjadi aktor utama yang bersentuhan langsung dengan sampah dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya. Saat ini sungai dijadikan sebagai salah satu tempat pembuangan sampah oleh sebagian masyarakat karena dianggap sebagai tempat yang kurang bermanfaat (Penny et al., 2012, p. 117). Dalam hal ini, masyarakat bantaran sungai memiliki peran yang sangat strategis sekaligus rentan. Di satu sisi, masyarakat bantaran sungai bisa berperan sebagai penghasil sampah sehari-hari dari berbagai aktivitas rumah

tangga ataupun dari kegiatan ekonomi. Dan di sisi lain, masyarakat bantaran sungai bisa memiliki peran besar dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah melalui kegiatan memilah, memanfaatkan, atau mendaur ulang sampah melalui program pengelolaan sampah.

Dengan demikian perlu adanya kerjasama antara TPS dan masyarakat bantaran sungai. Widodo (2023, p. 17) mendefinisikan kolaborasi sebagai hubungan kerjasama dengan bentuk partisipasi serta saling mendukung satu sama lain melalui informasi, sumber daya dan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan adanya kerjasama antara pengelola tempat pengolahan sampah dan masyarakat bantaran sungai dapat menghasilkan sebuah usaha dalam pengelolaan sampah yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat bantaran sungai dapat menjadi peran yang strategis dan tidak lagi menjadi rentan.

Melalui kerjasama yang dilakukan, masyarakat bantaran sungai dapat diarahkan untuk dapat berperan aktif dalam pemilahan, pendaur ulangan, serta pemanfaatan kembali sampah yang akan menjadikan masyarakat lebih berdaya dan akan membuka peluang baru lain seperti ekonomi. Prinsip 3R akan sangat sulit terwujud jika hanya dijalankan oleh lembaga pengelola saja tanpa adanya keterlibatan langsung dari masyarakat sebagai produsen utama sampah rumah tangga (Putranto, 2023, p. 8593). Maka dari itu kerjasama antara TPS dan masyarakat bantaran sungai sangat diperlukan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang awalnya masih membuang sampah ke sungai menjadi masyarakat yang memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah.

Dalam kerjasama yang dilakukan, tentunya peran pengelola TPS sangat penting untuk memastikan efektivitas kerjasama tersebut. Pengelola TPS tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengatur secara teknis pengumpulan dan pemilahan sampah namun juga sebagai fasilitator yang akan membantu masyarakat dengan tujuan pengelolaan lingkungan. Keberhasilan sistem TPS 3R itu sangat dipengaruhi oleh faktor pengelola dalam membangun partisipasi masyarakat dan merancang sistem pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (Aprilia et al., 2024, p. 59). Maka dari itu, pengelola TPS harus berorientasi pada

penerapan pengelolaan sampah berbasis 3R yang dilakukan melalui edukasi, pendampingan, dan demonstrasi pengelolaan sampah yang benar (Putranto, 2023, p. 8601). Melalui peran pengelola ini, diharapkan kegiatan kerjasama antara pengelola TPS dan masyarakat bantaran sungai dapat berjalan dengan optimal dan memberikan hasil nyata terhadap pengurangan jumlah timbulan sampah serta terhadap perubahan perilaku masyarakat bantaran sungai ke arah yang lebih baik.

Salah satu TPS yang telah bekerjasama dengan masyarakat bantaran sungai ialah TPS Mandiri. TPS Mandiri ini merupakan tempat pengolahan sampah yang berbasis 3R dengan tujuan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang langsung ke TPA. Sebagai sebuah tempat pengolahan sampah, TPS Mandiri tidak hanya berfungsi sebagai tempat dari pengumpulan, tetapi juga melakukan kegiatan pemilahan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali sampah agar dapat bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. TPS Mandiri ini telah berupaya dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat bantaran sungai guna merubah perilaku masyarakat dan agar dapat lebih berdaya dalam pengelolaan sampah yang tentunya dengan menggunakan prinsip 3R.

Dalam konteks kerjasama ini, proses pendidikan masyarakat menjadi sangat penting karena persoalan sampah tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, akan tetapi juga berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, kesadaran ekologis, dan tingkat partisipasi masyarakat. Kebiasaan membuang sampah ke sungai atau menyerahkan sepenuhnya pengelolaan sampah kepada pihak TPS menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kemandirian dalam mengelola sampah dari sumbernya. Oleh karena itu, pengelolaan sampah melalui TPS Mandiri perlu dilihat sebagai ruang pembelajaran sosial, yakni ruang ketika masyarakat belajar mengenali masalah, menyepakati tujuan, membagi peran, dan mempraktikkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari.

Kerjasama pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga memiliki hubungan erat dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan mengenai pemilahan sampah, keterampilan mengolah sampah organik dan anorganik, serta kesadaran untuk

menjaga lingkungan bantaran sungai. Apabila proses ini dilakukan secara berkelanjutan, maka pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih sadar, aktif, dan berdaya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dikaji dalam bidang Pendidikan Masyarakat karena menempatkan kerjasama pengelolaan sampah sebagai proses edukatif dan partisipatif dalam membangun perubahan perilaku masyarakat bantaran sungai.

Berdasarkan hasil pra-observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan teknik wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa ada beberapa program dari TPS Mandiri dalam pengelolaan sampah diantaranya ialah meliputi pengelolaan sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan pada umumnya dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik, kemasan plastik, dan kain perca dari konveksi dijadikan ecobrick lalu dimanfaatkan menjadi kursi dan meja. Jika ditelaah lebih lanjut, dalam pengelolaan sampah ini tentunya dapat memberikan kebermanfaatan secara langsung kepada masyarakat dalam segi lingkungan. Kedua pemanfaatan sampah tersebut jika melibatkan masyarakat secara keseluruhan akan dapat memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut dapat membantu mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang langsung ke TPA di perkotaan.

Adapun realita di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa sudah terjalin kerjasama antara pengelola TPS Mandiri dan masyarakat bantaran sungai dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik, namun tingkat partisipasi dari masyarakat belum konsisten dan kerjasama yang sudah terjalin tersebut belum bisa mendorong perilaku masyarakat dalam mengolah sampah mulai dari rumah. Maka dari itu perlu adanya bimbingan kepada masyarakat bantaran sungai yang dilakukan oleh pengelola tempat pengolahan sampah melalui TPS Mandiri. Kerjasama yang sudah terjalin tersebut juga menunjukkan adanya potensi kerjasama yang lebih kuat jika dilakukan melalui prinsip 3R yang dilakukan baik oleh pengelola TPS Mandiri maupun masyarakat bantaran sungai itu sendiri.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu akan tetapi sebagian besar hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan sampah itu sendiri dan belum banyak yang menyoroti dimensi sosial mengenai kerjasama antara pengelola TPS dan masyarakat bantaran sungai. Selain itu, lokasi TPS Mandiri yang ada di bantaran sungai menjadikan TPS Mandiri memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat bantaran sungai dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu, kondisi tersebut menjadi penting untuk diteliti secara mendalam mengenai kerjasama yang terjalin antara pengelola TPS Mandiri dan masyarakat bantaran sungai sehingga hal tersebut dapat dipahami dan diketahui bahwa sejauh mana kerjasama tersebut dapat berkontribusi terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Merujuk permasalahan yang terjadi di atas mengenai kerjasama yang telah berjalan antara pengelola TPS Mandiri dengan masyarakat bantaran sungai membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih jauh tentang bentuk dan pola kerjasama antara pengelola dengan masyarakat bantaran sungai dalam pengelolaan sampah tentunya melalui TPS Mandiri itu sendiri. Maka dari itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kerjasama Pengelolaan Sampah Dengan Masyarakat Bantaran Sungai (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Mandiri di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian yang dilakukan ini membutuhkan rumusan masalah untuk dijadikan fokus dalam melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kerjasama pengelolaan sampah dengan masyarakat bantaran sungai pada tempat pengolahan sampah Mandiri di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?”.

1.3 Definisi Operasional

Penulis menetapkan beberapa batasan istilah definisi operasional agar tidak terjadi kesalahan dalam memaknai istilah-istilah dalam pembahasan penelitian yang dilakukannya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kerjasama yakni sebuah proses yang dimana dua orang atau lebih bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Tahapan kerjasama ini dilakukan melalui beberapa tahapan seperti proses identifikasi masalah, penyelarasan tujuan dan strategi, pembagian peran, serta pelaksanaan kerjasama. Dalam penelitian ini, kerjasama digambarkan sebagai bentuk dan pola kerjasama yang dilakukan oleh pengelola TPS Mandiri dan masyarakat bantaran sungai dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan melalui tahapan-tahapan kerjasama.
- b. Pengelolaan sampah merupakan proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pendaur ulangan, serta pemanfaatan kembali sampah dengan berbasis prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sebagai upaya untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran di lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, pengelolaan sampah difokuskan dalam serangkaian kegiatan kerjasama antara pengelola TPS Mandiri dengan masyarakat bantaran sungai melalui beberapa program TPS Mandiri dengan menjunjung tinggi prinsip 3R dalam pelaksanaannya. Adapun program yang dimaksud ialah program pengelolaan sampah organik dan program pengelolaan sampah anorganik.
- c. Masyarakat bantaran sungai merupakan masyarakat yang mendiami dan memanfaatkan lahan di tepi sungai untuk dijadikan tempat tinggal dan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam penelitian ini, masyarakat bantaran sungai dimaknai sebagai penghasil sampah rumah tangga dan sebagai pelaku aktivitas ekonomi sehingga hal tersebut yang menyebabkan masyarakat bantaran sungai dituntut untuk aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah bersama TPS Mandiri.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami kerjasama pengelolaan sampah dengan masyarakat bantaran sungai pada tempat pengolahan sampah Mandiri di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang serupa serta memperdalam ilmu pengetahuan tentang kerjasama dan pengelolaan sampah berbasis 3R di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Bagi TPS Mandiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai penguatan kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat bantaran sungai dalam pengelolaan sampah. Dan bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan rujukan selanjutnya bagi penelitian yang relevan. Serta bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk aktualisasi keilmuan penulis serta dapat menambah pengalaman pada bidang akademik.